

Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Kota Makassar

Rastina

*Politeknik Negeri Ujung Pandang
rastinaachmad@yahoo.com*

Afdaliah

*Politeknik Negeri Ujung Pandang
afdaliahashri_haris@yahoo.co.id*

(Diterima: 00-Bulan-2016; direvisi: 00-Bulan-2016; dipublikasikan: 00-Desember-2016)

Abstract

The purpose of this research was to analyze the contribution of regional original revenue on financial independence of Makassar city for 2010 until 2014. The type of this research is quantitative field research. The data used in this research is financial data of Makassar city in fiscal year 2010 until 2014. According to analysis have been obtained the results showed that the sector of local taxes is a kind collection who provided the greatest contribution to regional original revenue because the average contribution per year in income reached 77.92%, then local retribution with an average is 17.15%, legitimate income is 3.40% and the smallest results separated areas of wealth management is 1.53% . While the results of the financial ratio analysis showed that the average of degree of decentralization ratio is 22.56%, financial independence is 29.60%, effectiveness is 101.33%, growth is 37.79%, and share of regional original revenue is 23.07%.

Keywords : *Regional Original Revenue, Financial Independence*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kontribusi pendapatan asli daerah terhadap kemandirian keuangan kota Makassar untuk tahun 2010 sampai 2014. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data keuangan kota Makassar pada tahun anggaran 2010 sampai dengan 2014. Menurut analisis yang telah diperoleh hasilnya menunjukkan bahwa sektor pajak daerah merupakan jenis koleksi yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan asli daerah karena rata-rata kontribusi per tahun untuk pendapatan mencapai 77,92%, maka retribusi daerah dengan rata-rata adalah 17,15%, pendapatan yang sah adalah 3,40% dan hasil terkecil memisahkan area pengelolaan kekayaan sebesar 1,53%. Sedangkan hasil analisis rasio keuangan menunjukkan bahwa rata-rata tingkat rasio desentralisasi adalah 22,56%, kemandirian finansial sebesar 29,60%, efektivitasnya adalah 101,33%, pertumbuhan sebesar 37,79%, dan pangsa pendapatan asli daerah adalah 23,07%.

Kata kunci : *Pendapatan Asli Daerah, Kemandirian Keuangan*

PENDAHULUAN

Perubahan kebijakan pemerintah dari sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi membuat setiap pemerintah daerah di seluruh Indonesia harus siap untuk menerima kewenangan yang diserahkan dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah diberikan otonomi yang lebih

luas, nyata, dan bertanggung jawab untuk mengatur rumah tangganya sendiri dan menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah pusat di daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan dari pungutan pajak

daerah, retribusi daerah, hasil dari perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, penerimaan dari dinas-dinas, dan penerimaan lainnya yang termasuk dalam PAD. PAD menjadi indikator keberhasilan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Semakin tinggi PAD maka semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhannya sendiri. Hal ini menandakan bahwa pemerintah daerah tersebut telah berhasil dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Kabupaten/kota sudah seharusnya mengoptimalkan penerimaan pajak daerah sebagai sumber dari PAD. Kemampuan menggali potensi sumber penerimaan pajak daerah tersebut harus diikuti dengan kemampuan penetapan target sesuai dengan potensi sebenarnya serta kemampuan menekan biaya yang dikeluarkan dalam pemungutannya.

Kota Makassar sebagai salah satu bagian kabupaten/kota di Propinsi Sulawesi Selatan memiliki Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan yang signifikan mulai dari tahun 2010 sampai dengan 2014. Hal ini dapat dilihat dari proporsi PAD rata-rata 23,2% dari seluruh pendapatan daerah yang mengalami peningkatan rata-rata 17,7% per tahun. Peningkatan PAD juga sejalan dengan peningkatan pendapatan transfer meskipun proporsi pendapatan transfer sangat tinggi dibandingkan dengan PAD yaitu rata-rata 76,8% dari seluruh pendapatan daerah. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan seberapa besar kontribusi PAD dalam kemandirian keuangan Kota Makassar. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kontribusi PAD terhadap kemandirian kota Makassar.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini data sekunder yang dikumpulkan adalah data APBD Kota Makassar mulai dari tahun 2010 sampai dengan 2014. Dalam melakukan analisis terhadap data yang diperoleh, digunakan metode analisis deskriptif kuantitatif. Langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data yaitu:

1. Mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan berupa dokumen keuangan dari pihak terkait seperti realisasi dan

target penerimaan PAD dan APBD mulai dari tahun 2010 sampai dengan 2014.

2. Mengolah data yang diperoleh sebagai bahan untuk menganalisis permasalahan dengan menggunakan pendekatan kontribusi setiap jenis pendapatan terhadap PAD, kontribusi setiap sektor PAD terhadap total pendapatan, dan penggunaan beberapa rasio untuk mengetahui tingkat kemandirian keuangan Kota Makassar.

Rasio keuangan daerah yang digunakan, yaitu:

- a. Rasio Derajat Desentralisasi
- b. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
- c. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah
- d. Rasio Pertumbuhan
- e. Rasio Peran Pendapatan Asli Daerah

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Rasio Keuangan

Kemampuan keuangan dan anggaran daerah pada dasarnya adalah kemampuan dari pemerintah daerah dalam meningkatkan sumber-sumber penerimaan PAD. Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom adalah terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya. Ketergantungan pada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat.

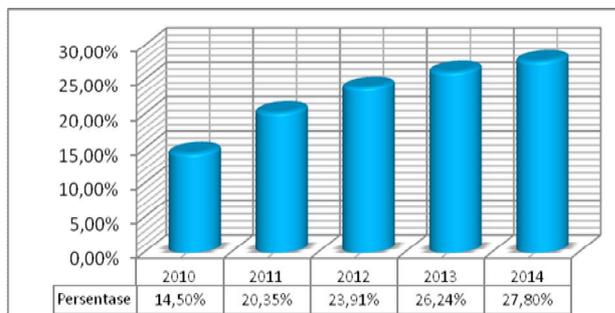
Pemerintah Kota Makassar terus berupaya meningkatkan penerimaan PAD yang bersumber dari berbagai sektor untuk mencapai kemandirian daerah sehingga pemerintah Kota Makassar dapat membiayai sendiri seluruh pembiayaan dan meningkatkan kemajuan Kota Makassar tanpa bergantung bantuan dari pemerintah pusat. Penilaian kesuksesan dalam pemungutan PAD dari pemerintah Kota Makassar dapat diukur dari sisi target dengan realisasi penerimaannya. Seperti yang pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1 Realisasi Pendapatan Daerah Kota Makassar Tahun 2010 sampai dengan 2014 (dalam jutaan Rupiah)

TA	Total Pendapatan	PAD	Pendapatan Transfer	Proporsi	
				PAD	Pendapatan Transfer
2010	1.417.547	210.136	1.207.411	15%	85%
2011	1.686.989	351.693	1.335.296	21%	79%
2012	2.002.223	491.067	1.511.156	25%	75%
2013	2.300.792	619.593	1.681.199	27%	73%
2014	2.567.080	730.989	1.836.091	28%	72%

Rasio Derajat Desentralisasi

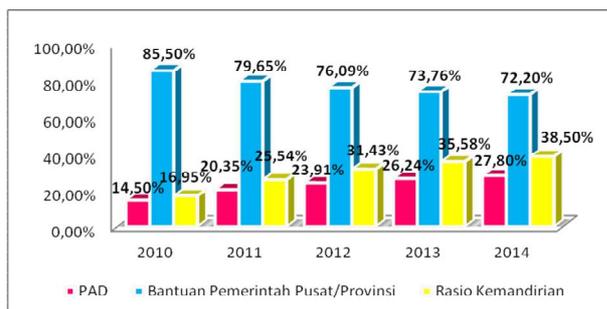
Hasil skala derajat desentralisasi fiskal yang ditunjukkan dalam Gambar 1.



Gambar 1 Tingkat Derajat Desentralisasi Kota Makassar Tahun 2010 sampai dengan 2014

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Hasil skala rasio kemandirian keuangan daerah ditunjukkan pada Gambar 2.

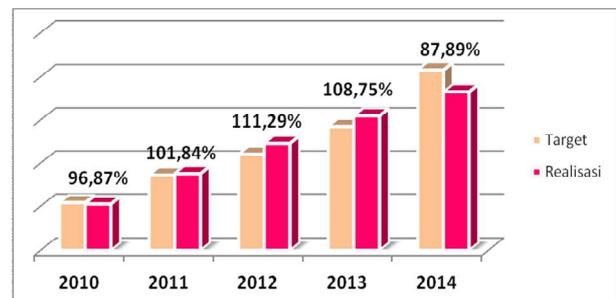


Gambar 2 Tingkat Kemandirian Keuangan Kota Makassar Tahun 2010 sampai dengan 2014

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah
Kriteria rasio efektivitas menurut Halim (2011), adalah:

1. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($x < 100\%$) berarti tidak efektif.
2. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($x = 100\%$) berarti efektivitas berimbang.
3. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($x > 100\%$) berarti efektif.

Sehingga dari kriteria tersebut maka rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar ditunjukkan pada gambar 3.

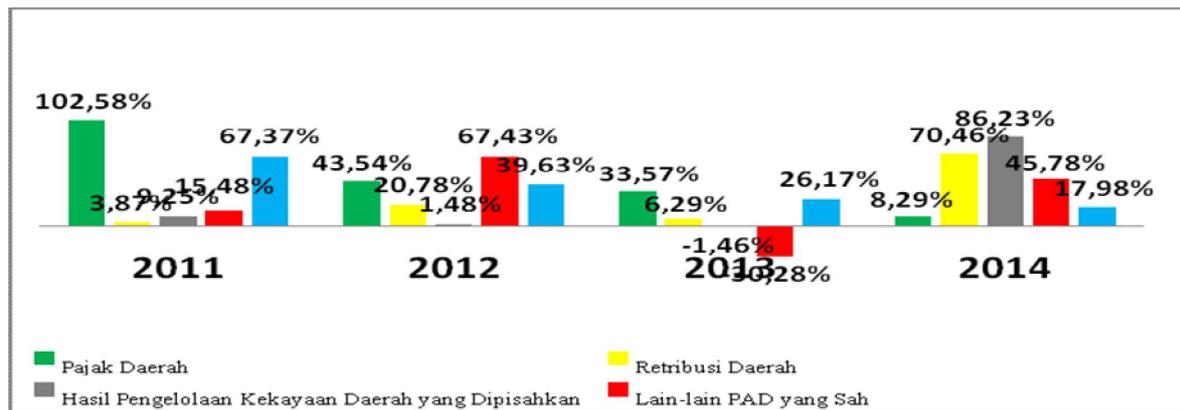


Gambar 3 Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar Mulai Tahun 2010 sampai dengan 2014

Berdasarkan Gambar 3 di atas, dapat disimpulkan bahwa pemungutan PAD Kota Makassar belum sepenuhnya efektif. Meskipun pendapatan PAD Kota Makassar mengalami tren yang cukup menanjak setiap tahunnya, namun jika dilihat dari tabel realisasi PAD selama lima tahun tersebut menunjukkan bahwa Kota Makassar tidak mampu merealisasikan target PAD pada tahun 2010 dan 2014.

Rasio Pertumbuhan

Analisis mengenai rasio pertumbuhan kota Makassar dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4 Grafik Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar Tahun 2010 sampai dengan 2014

Peran Pendapatan Asli Daerah (Share)

Peran Pendapatan Asli Daerah itu sendiri dapat dilihat pada Gambar 5.



Gambar 5 Grafik Peran Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar Tahun 2010 sampai dengan 2014

Pajak Daerah

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan mengenai rata-rata tingkat kontribusi terbesar diberikan oleh bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yaitu sebesar 22,70%. Sedangkan kontribusi terkecil diperoleh dari sektor pajak sarang burung walet yaitu hanya sebesar 0,002% dan kontribusi terkecil juga diberikan oleh pajak air bawah tanah yang presentase penerimaannya hanya sebesar 0,02%.

Tabel 2 Target dan Realisasi Pajak Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2010 sampai dengan 2014 (dalam Jutaan Rupiah)

No.	Jenis Pajak	2010		2011		2012		2013		2014	
		Target	Realisasi								
1.	P. Hotel	32.323	31.614	34.823	35.010	42.000	37.693	43.000	44.518	75.164	50.534
2.	P. Restoran	33.817	31.065	36.317	36.014	44.697	42.946	46.197	52.029	75.116	70.900
3.	P. Hiburan	10.846	9.949	14.000	10.251	14.175	13.666	15.175	16.306	23.695	18.454
4.	P. Reklame	10.387	11.401	16.000	16.937	18.449	19.010	21.000	19.681	23.248	19.859
5.	P. Penerangan Jalan	43.650	46.879	65.000	65.779	89.500	92.807	103.000	114.679	144.540	139.445
6.	P. Pengambilan & Peng. B. Gal. Gol. C	100	138	121	197	121	252	171	312	180	330
7.	P. Parkir	3.093	2.505	4.000	4.600	5.500	6.129	7.000	9.913	15.050	12.166
8.	P. Air Bawah Tanah	-	-	175	116	175	158	175	154	175	167
9.	P. Sarang Burung Walet	-	-	50	13	50	11	11	15	5	9
10.	P. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	-	-	90.000	101.631	122.500	175.669	146.000	172.174	200.062	153.177
11.	P. Bumi dan Bangunan Sektor P2	-	-	-	-	-	-	78.838	88.926	114.846	96.643
Jumlah Target		134.216	133.551	260.486	270.548	337.167	388.341	460.567	518.706	672.081	561.684

Retribusi Daerah

Berdasarkan Tabel 3 berikut ini, retribusi yang memiliki kontribusi yang besar terhadap PAD diperoleh dari retribusi izin mendirikan bangunan. Sedangkan retribusi yang memiliki

kontribusi terkecil terhadap PAD dalam kurun waktu tahun 2010 hingga 2014 diperoleh dari retribusi penyeberangan di atas air karena hanya memiliki tingkat kontribusi sebesar 0,0001% terhadap PAD.

Tabel 3 Kontribusi Retribusi

No.	Jenis Pajak	2010		2011		2012		2013		2014		Rata-rata	
		Komp. Dlm P. Daerah	Kontr. Thdp PAD	Komp. Dlm P. Daerah	Kontr. Thdp PAD	Komp. Dlm P. Daerah	Kontr. Thdp PAD	Komp. Dlm P. Daerah	Kontr. Thdp PAD	Komp. Dlm P. Daerah	Kontr. Thdp PAD	Komp. Dlm P. Daerah	Kontr. Thdp PAD
1.	P. Hotel	23,67%	15,04%	12,94%	9,95%	9,71%	7,77%	8,58%	7,10%	9,00%	6,91%	12,78%	9,36%
2.	P. Restoran	23,26%	14,78%	13,31%	10,24%	11,06%	8,86%	10,03%	8,29%	12,62%	9,70%	14,06%	10,37%
3.	P. Hiburan	7,45%	4,73%	3,79%	2,91%	3,52%	2,82%	3,14%	2,60%	3,29%	2,52%	4,24%	3,12%
4.	P. Reklame	8,54%	5,43%	6,26%	4,82%	4,90%	3,92%	3,79%	3,14%	3,54%	2,72%	5,40%	4,00%
5.	P. Penerangan Jalan	35,10%	22,31%	24,31%	18,70%	23,90%	19,14%	22,11%	18,28%	24,83%	19,08%	26,05%	19,50%
6.	P. Pengambilan & Peng. B. Gal. Gol. C	0,10%	0,07%	0,07%	0,06%	0,06%	0,05%	0,06%	0,05%	0,06%	0,05%	0,07%	0,05%
7.	P. Parkir	1,88%	1,19%	1,70%	1,31%	1,58%	1,26%	1,91%	1,58%	2,17%	1,66%	1,85%	1,40%
8.	P. Air Bawah Tanah	0	0	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
9.	P. Sarang Burung Walet	0	0	0,005%	0,004%	0,003%	0,002%	0,003%	0,002%	0,002%	0,001%	0,002%	0,002%
10.	P. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	37,56%	28,90%	45,24%	36,22%	33,19%	27,45%	27,27%	20,95%	28,65%	22,70%
11.	P. Bumi dan Bangunan Sektor P2	0	0	0	0	0	0	17,14%	14,18%	17,21%	13,22%	6,87%	5,48%
Total Kontribusi		100%	63,55%	100%	76,93%	100%	80,07%	100%	82,70%	100%	76,84%	100%	76,02%

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Berdasarkan Tabel 4 berikut ini menunjukkan bahwa rata-rata kontribusi terbesar terhadap PAD diberikan oleh perusahaan

pemerintah yaitu PT. Bank Sulsel. Sedangkan laba perusahaan daerah dan perusahaan swasta masih tergolong kecil kontribusinya. Bahkan PD. Air Minum tidak memberikan kontribusi selama empat tahun terakhir.

Tabel 4 Kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

No.	Jenis Laba	2010		2011		2012		2013		2014		Rata-rata	
		Komp. Dlm H. P. K. Daerah	Kontr. Thdp PAD	Komp. Dlm H. P. K. Daerah	Kontr. Thdp PAD	Komp. Dlm H. P. K. Daerah	Kontr. Thdp PAD	Komp. Dlm H. P. K. Daerah	Kontr. Thdp PAD	Komp. Dlm H. P. K. Daerah	Kontr. Thdp PAD	Komp. Dlm H. P. K. Daerah	Kontr. Thdp PAD
A.	Laba Perusahaan Daerah	11,28%	0,31%	9,05%	0,16%	10,78%	0,14%	5,68%	0,06%	47,57%	0,77%	16,78%	0,29%
1.	PD. Air Minum	0	0	0	0	0	0	0	0	42,25%	0,68%	8,45%	0,14%
2.	PD. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	0,22%	0,01%	0,17%	0,003%	1,04%	0,01%	0	0	0	0	0,29%	0,005%
3.	PD. Pasar Makassar Raya	1,98%	0,05%	1,57%	0,03%	0,40%	0,01%	3,81%	0,04%	2,92%	0,05%	2,14%	0,03%
4.	PD. Rumah Potong Hewan (RPH)	0,28%	0,01%	1,01%	0,02%	0	0	0,28%	0,003%	0	0	0,31%	0,01%
5.	PD. Parkir	2,70%	0,07%	2,68%	0,05%	6,36%	0,08%	0,98%	0,01%	1,48%	0,02%	2,84%	0,05%
6.	PD. Terminal	6,10%	0,17%	3,62%	0,07%	2,98%	0,04%	0,61%	0,01%	0,93%	0,02%	2,85%	0,06%
B.	Perusahaan Pemerintah	84,41%	2,34%	87,00%	1,57%	85,33%	1,13%	89,13%	0,90%	49,64%	0,80%	79,10%	1,35%
1.	PT. Bank Sulsel	84,41%	2,34%	86,07%	1,56%	83,49%	1,11%	85,62%	0,87%	48,37%	0,78%	77,59%	1,33%
2.	PT. KIMA Makassar	0	0	0,93%	0,02%	1,85%	0,02%	3,51%	0,04%	1,28%	0,02%	1,51%	0,02%
C.	Perusahaan Swasta	4,31%	0,12%	3,95%	0,07%	3,89%	0,05%	5,19%	0,05%	2,79%	0,05%	4,03%	0,07%
1.	PT. Gowa Makassar Tourism Development (GMTD)	4,31%	0,12%	3,95%	0,07%	3,89%	0,05%	5,19%	0,05%	2,79%	0,05%	4,03%	0,07%
Total Kontribusi		100%	2,77%	100%	1,81%	100%	1,33%	100%	1,01%	100%	1,62%	100%	1,71%

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Berdasarkan Tabel 5 menunjukkan mengenai kontribusi lain-lain PAD yang sah

mulai dari tahun 2010 hingga 2014 dapat dilihat bahwa kontribusi terbesar diberikan oleh penerimaan jasa giro yaitu 1,98% dan lain-lain PAD yaitu sebesar 1,14%.

Tabel 5 Kontribusi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

No.	Jenis Lain-lain PAD yang Sah	2010		2011		2012		2013		2014		Rata-rata	
		Komp. Dlm Lain2 PAD yang Sah	Kontr. Thdp PAD	Komp. Dlm Lain2 PAD yang Sah	Kontr. Thdp PAD	Komp. Dlm Lain2 PAD yang Sah	Kontr. Thdp PAD	Komp. Dlm Lain2 PAD yang Sah	Kontr. Thdp PAD	Komp. Dlm Lain2 PAD yang Sah	Kontr. Thdp PAD	Komp. Dlm Lain2 PAD yang Sah	Kontr. Thdp PAD
1.	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	5,67%	0,30%	4,24%	0,15%	2,00%	0,09%	3,26%	0,08%	1,11%	0,03%	3,26%	0,13%
2.	Penerimaan Jasa Giro	48,07%	2,53%	44,15%	1,60%	41,83%	1,84%	71,54%	1,70%	75,14%	2,23%	56,15%	1,98%
3.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0	0	0	0	0	0	5,11%	0,12%	3,13%	0,09%	1,65%	0,04%
5.	Pendapatan dari Pengembalian	0	0	0	0	0	0	0	1,23%	18,98%	0,56%	3,80%	0,11%
6.	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	7,61%	0,40%	6,48%	0,23%	4,54%	0,20%	15,71%	0,37%	0,41%	0,01%	6,95%	0,24%
7.	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan	0,55%	0,03%	4,33%	0,16%	1,52%	0,07%	4,34%	0,10%	1,24%	0,04%	2,40%	0,08%
8.	Lain-lain PAD	38,03%	2,00%	40,74%	1,48%	50,08%	2,20%	0	0	0	0	25,77%	1,14%
9.	Royalti Atas Pengelolaan P. Kayangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Hasil Operasional Kapal Perikanan	0,06%	0,003%	0,05%	0,002%	0,03%	0,001%	0,03%	0,001%	0	0	0,04%	0,002%
Total Kontribusi		100%	5,25%	100%	3,62%	100%	4,40%	100%	2,37%	100%	2,97%	100%	3,72%

Komposisi Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar Tahun 2010 hingga 2014

Berdasarkan tabel 6 dapat disimpulkan bahwa rata-rata kontribusi dari komponen PAD yang masih menjadi dominan adalah dari pajak daerah dan retribusi daerah dengan rata-rata

persentase sebesar 78% dan 17% sedangkan komponen lainnya dalam PAD yaitu hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah rata-rata persentasenya hanya 2% dan 3%.

Tabel 6 Komposisi Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar

Komposisi PAD	2010		2011		2012		2013		2014	
	Jumlah	%								
Pajak Daerah	133.551	63,56	270.548	76,93	388.341	79,08	518.707	83,72	561.684	76,84
Retribusi Daerah	59.729	28,42	62.043	17,64	74.936	15,26	79.651	12,86	135.777	18,57
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	5.817	2,77	6.355	1,81	6.449	1,31	6.355	1,03	11.835	1,62
Lain-lain PAD yang Sah	11.037	5,25	12.746	3,62	21.341	4,35	14.880	2,40	21.692	2,97
Jumlah PAD	210.134	100	351.692	100	491.067	100	619.593	100	730.988	100
Rata-rata	52.534	-	87.923	-	122.767	-	154.898	-	182.747	-

Analisis Rasio Keuangan

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Berdasarkan Tabel 7 berikut ini menunjukkan rata-rata rasio derajat desentralisasi kemampuan keuangan Kota Makassar berada pada tingkat kemampuan yang cukup yaitu dengan persentase sebesar 22,56% dan berada pada kisaran 20,01%-30,00%.

Tabel 7 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Tahun Anggaran	Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan Daerah	Persentase	Kemampuan Keuangan
2010	210.134	1.449.663	14,50%	Kurang
2011	351.692	1.728.571	20,35%	Cukup
2012	491.067	2.053.678	23,91%	Cukup
2013	619.593	2.361.037	26,24%	Cukup
2014	730.988	2.629.818	27,80%	Cukup
Rata-rata			22,56%	Cukup

KESIMPULAN

Kontribusi terbesar dalam komponen PAD mulai dari tahun 2010 hingga 2014 adalah pajak daerah dengan rata-rata kontribusi pendapatannya sebesar 77,92%, disusul oleh retribusi daerah dengan rata-rata 17,15%, lain-lain PAD yang sah sebesar 3,40%, dan yang terkecil adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu sebesar 1,53%. Secara keseluruhan dari hasil perhitungan rasio-rasio keuangan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa kemandirian keuangan Kota Makassar masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan masih besarnya peran pemerintah pusat dalam mendanai belanja daerah Kota Makassar sedangkan peran PAD masih tergolong kecil karena belum melampaui 50% dari peran pemerintah pusat. Kontribusi PAD terhadap kemandirian keuangan Kota Makassar tahun anggaran

2010 hingga 2014 terus mengalami peningkatan-an setiap tahunnya. Berdasarkan hasil perhitungan, hampir semuanya menunjukkan grafik peningkatan. Artinya, kinerja pengelola-an terhadap PAD ini terus membaik setiap tahunnya. Selain itu kontribusi yang diberikan PAD terhadap penerimaan daerah juga semakin meningkat sehingga menyebabkan kontribusi pemerintah pusat dalam membiayai pengeluaran daerah semakin sedikit.

Implikasi Penelitian

Penelitian memberikan implikasi bagi pemerintahan daerah khususnya kota Makassar yakni:

Untuk meningkatkan tingkat kemandirian pemerintah daerah Kota Makassar diharapkan dapat mengoptimalkan PAD melalui pemanfaatan sektor pajak, selanjutnya lebih meningkatkan penerimaan PAD yang bersumber dari bagian laba badan usaha daerah dan pemanfaatan potensi alam dan sumber daya yang dimiliki Kota Makassar sehingga PAD dapat lebih dioptimalkan.

Mengidentifikasi penyebab kelemahan, kekuatan, peluang, dan tantangan dalam sistem dan prosedur penerimaan PAD sebagai basis dalam membuat perencanaan program peningkatan pendapatan daerah setiap tahunnya dan mengevaluasi faktor tidak terealisasinya target dari penerimaan PAD dengan melaksanakan peraturan perundang-undangan secara tegas dan konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2014. *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga
- Mustarin, Taufiq. 2013. *Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Dalam Memenuhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Makassar*. Makassar: Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Ujung Pandang.
- Sholikhah, Ratna. 2011. *Analisis Kemampuan Kemandirian Keuangan Daerah dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2000-2009*. Surakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Menkumham.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Vurry, Anjar Nora, I wayan Suwendra, Fridayana Yudiaatmaja. 2014. *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dan Trend Pada Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2004-2013*. Jurnal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen, Vol.2.